



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

# MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

# Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 179–183

## Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan

Ajeng Pratiwi, Eli Apud Saepudin, Nurul Hotimah, Sofia Maulidah,  
Yuliyani

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1306>

### How to Cite this Article

APA : Pratiwi, A., Saipudin, E. A., Hotimah, N., Maulidah, S., & Yuliyani. (2024). Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan: kebijakan Ekonomi. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 179 – 183. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1306>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

## Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan

Ajeng Pratiwi<sup>1\*</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>2</sup>, Nurul Hotimah<sup>3</sup>, Sofia Maulidah<sup>4</sup>, Yuliyani<sup>5</sup>  
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,  
Indonesia.<sup>12345</sup>

Email:

ajengprtwi085@gmail.com<sup>1\*</sup>, eli.apudsaeputin@binabangsa.ac.id<sup>2</sup>, nurulhthm2009@gmail.com<sup>3</sup>  
yani6770@gmail.com<sup>4</sup>, shofiamaulida1231@gmail.com<sup>6</sup> yani6770@gmail.com<sup>5</sup>

Diterima: 29-03-2024

| Disetujui: 30-03-2024

| Diterbitkan: 31-03-2024

### ABSTRAK

*Dalam menganalisis ekonomi kebijakan melibatkan pengumpulan dan analisis data ekonomi yang relevan, serta penerapan teori ekonomi untuk memahami dampak kebijakan tertentu. Dalam merancang konsep ekonomi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Misalnya, perlu dipertimbangkan dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, dalam merancang konsep ekonomi kebijakan, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, konsep ekonomi kebijakan harus mampu mencapai tujuan efisiensi ekonomi tanpa mengorbankan keadilan sosial. Dalam analisis abstrak ini, juga perlu dipertimbangkan adanya trade-off di antara berbagai tujuan kebijakan. Misalnya, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin harus mengorbankan stabilitas inflasi, atau sebaliknya. Dengan demikian, analisis abstrak dalam merancang konsep ekonomi kebijakan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang efektif dan optimal bagi perekonomian suatu negara.*

**Kata Kunci:** ekonomi, Pemerintah, pasar

## PENDAHULUAN

Merancang konsep ekonomi kebijakan memerlukan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Dinamika ekonomi yang terus berubah dan sulit di prediksi, juga sulit untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam jangka panjang karena faktor penyebab seperti perubahan teknologi, globalisasi, dan bencana alam. Kebijakan saat ini mungkin tidak relevan di masa depan, keterbatasan informasi atau data, kebijakan pengambilan keputusan seringkali terhambat oleh kurangnya data yang akurat dan terkini terkait kondisi ekonomi dan sosial. Hal ini menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Konflik kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat seringkali berbeda dan bersaing. Merumuskan kebijakan yang adil dan seimbang untuk semua pihak menjadi tantangan yang signifikan. Dampak dari kebijakan ekonomi memerlukan biaya yang besar dalam hal keuangan maupun sumber daya lainnya. Pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat sebelum implementasi. Sangat sulit untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan secara akurat karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Hal ini menjadi kesulitan dalam belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kebijakan dimasa depan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi menyebabkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Ekonomi kebijakan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal perekonomian. Dapat berupa Kebijakan Fiskal yaitu mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah, Kebijakan Moneter yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, Kebijakan perdagangan mengatur perdagangan Internasional, dan Kebijakan sosial yang menyediakan layanan dan program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari Ekonomi Kebijakan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi kebijakan terdiri dari Pasar dan kegagalan pasar, yang menjelaskan bagaimana cara pasar bekerja dan bagaimana kegagalan pasar dapat terjadi. Peran pemerintah, yaitu bagaimana upaya pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan mencapai tujuan ekonomi. Instrumen kebijakan, menjelaskan beberapa instrumen kebijakan yang bisa digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Analisis biaya manfaat, untuk mengukur dan membandingkan biaya dan manfaat dalam suatu kebijakan. Yang terakhir Evaluasi kebijakan, yaitu mengevaluasi suatu kebijakan.

Peran dan fungsi pemerintah dibidang ekonomi yaitu berperan dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi ,individu dan anggota masyarakat anggota masyarakat yang memiliki peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplemented dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi sosial politik hukum pertahanan dan keamanan fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa seperti pembangunan jalan raya gedung sekolah penyediaan fasilitas penerangan dan telepon fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu pembangunan ekonomi di banyak negara terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung intervensi Pemerintah perlu dalam perekonomian untuk mengurangi kegagalan pasar seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan. Mekanisme pasar tidak bisa berfungsi tanpa beradanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini memberi landasan bagi penerapan aturan main termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang

melanggar. Untuk menjamin efisiensi dan stabilitas ekonomi perlu peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (market failure) adalah istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum hal ini terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi yang terutama berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa atau disebut dengan kebutuhan publik yang meliputi dua macam yaitu barang dan jasa publik dengan barang dan jasa privat. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang memanfaatkannya bisa dinikmati bersama contohnya yaitu jalan Raya fasilitas kesehatan pendidikan transportasi air minum dan penerangan. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi yang penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya pembelian pakaian yang menjadi hak milik dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang. (Herdiana, 2013)

Secara konseptual, Sistem kebijakan ekonomi di Indonesia berbeda dengan liberalisme maupun merkantilisme. Dalam sistem liberalis, hak milik perseorangan (property right) diakui dan dilindungi. Selanjutnya alokasi sumber daya tidak ditentukan oleh negara, melainkan diserahkan kepada tangan-tangan gaib (invisible hand), yaitu mekanisme pasar. Negara adalah visible hand yang perannya bisa mendistorsi pasar dan karena itu harus dibatasi seminimal mungkin. Sebaliknya dalam merkantilisme, negara memegang peranan yang sangat dominan dalam menentukan segala aturan main dalam pengembangan sumber daya dan distribusinya. Negara berkuasa mutlak dalam menetapkan segala-galanya baik dalam pemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan faktor-faktor produksi. (Hafizah, 2005)

## **METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif kualitatif dalam merancang konsep ekonomi kebijakan mencakup pengumpulan dan analisis data dalam bentuk kualitatif dan bersifat subjektif. Metode kualitatif membantu menangani data yang tidak dapat diterangkumi dalam statistik, seperti data yang tidak dapat diterangkumi dalam angka atau data yang tidak dapat diterangkumi dalam kuantitas. Metode kualitatif digunakan untuk menangani data eksplorasi, yang diperoleh dari sampel. Metode kualitatif juga membantu dalam membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Penggunaan metode kualitatif dalam analisis kebijakan digunakan untuk menangani model kompleks dan kumpulan data besar, yang diperoleh dari sampel. Pada 1990-an, analisis kualitatif menjadi jauh lebih umum dan terinformasi, terutama karena perangkat lunak statistik, seperti SPSS, SAS, dan STATA, memfasilitasi penggunaan metode kualitatif untuk menangani model kompleks dan kumpulan data besar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Identifikasi masalah: Tahap ini mengidentifikasi masalah ekonomi yang ingin diatasi oleh kebijakan. Masalah ini dapat berupa pengangguran, inflasi, kemiskinan, atau ketidaksetaraan. Analisis penyebab: Tahap ini menganalisis penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Analisis ini harus komprehensif dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah. Kajian solusi: Tahap ini mengkaji berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah. Solusi ini harus dikaji



secara objektif dan berdasarkan bukti empiris. Evaluasi dampak: Tahap ini mengevaluasi dampak potensial dari berbagai solusi yang dikaji. Evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan politik dari setiap solusi. Pembahasan: Rekomendasi kebijakan: Berdasarkan hasil analisis, pembahasan ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Rekomendasi ini harus didukung oleh bukti empiris dan argumen yang logis. Implementasi kebijakan: Pembahasan ini juga membahas bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Implementasi kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, dan dukungan politik. Evaluasi dan monitoring: Pembahasan ini membahas bagaimana kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dimonitoring. Evaluasi dan monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.

## **KESIMPULAN**

Analisis yang komprehensif dan mendalam sangat penting dalam merancang konsep ekonomi kebijakan. Hasil analisis tersebut harus digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dan efektif. Implementasi dan monitoring kebijakan juga harus dipertimbangkan dengan matang agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Memahami Konteks dan Tantangan Ekonomi dengan menganalisis kondisi ekonomi makro dan mikro, termasuk tren, fluktuasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi isu dan tantangan ekonomi utama yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan inflasi. Memahami tujuan dan sasaran kebijakan ekonomi yang ingin dicapai. Melakukan Analisis Dampak Kebijakan, menilai dampak positif dan negatif dari berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Mempertimbangkan distribusi dampak kebijakan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok kaya, miskin, dan rentan. Memperhitungkan biaya dan manfaat ekonomi dari setiap opsi kebijakan. Memilih Kebijakan yang Tepat, memilih opsi kebijakan yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Memperhatikan konsistensi kebijakan dengan kebijakan lain yang ada. Memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Memantau dan Mengevaluasi Kebijakan, Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan. Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan. Melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyani, L., Gultom, A., Ketiara, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., Tangerang, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., & Selatan, K. T. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Indonesia. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2.
- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Indonesia (Tahun 1993-2007). *Jejaring Administrasi Publik*, 6(2), 588–603.
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(Mei), 68–89.
- eri Kurniawansyah HS\*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, S. N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia.

- Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No.(2), 130–139.  
file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Hafizah, Y. (2005). Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Millah*, 4(2), 31–46. <https://doi.org/10.20885/millah.vol4.iss2.art3>
- Herdiana. (2013). Kebijakan Ekonomi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.38>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 214–215.
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)
- Penelitian, P., Sosial, P., & Pertanian, E. (1992). Pantjar Simatupang. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), 1–23.
- Purwanti, I. (2021). Konsep implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah (Studi kasus: Keberlanjutan bank sampah Tanjung). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 89–98. <https://jurnal.ungha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>
- Valencia, R., Garcia, J., Espinosa, R., Saadia, M., & Valencia, E. (2010). 14 Year Follow-Up for a Severe Electrical Burn to Mouth and Lip: Case report. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 35(2), 137–144. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>
- Wijayanti, Y. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Yusdja, Y. (2005). Kebijakan ekonomi industri agribisnis sapi perah di indonesia. 3(70), 257–268.